

Dekati Target, Penyaluran Pupuk Subsidi Capai 1,42 Juta Ton

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 1,42 juta ton, pada periode Januari hingga 8 Maret 2023. Jumlah ini setara dengan 79,6% dari alokasi hingga Maret 2023 sebesar 2,23 juta ton. Pemerintah menetapkan total alokasi pupuk bersubsidi pada 2023 sebesar 7,85 juta ton. Untuk rinciannya, pupuk Urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Sementara itu, rencana produksi Pupuk Indonesia tahun ini sebesar 12,3 juta ton, untuk kebutuhan pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal, menyebutkan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pupuk bersubsidi terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk Urea dan NPK. "Rinciannya, pupuk Urea telah tersalurkan sebesar 840 ribu ton, sedangkan pupuk NPK telah tersalurkan sebesar 586 ribu ton," jelas Gusrizal dalam siaran pers, Kamis (9/3/2023). Pupuk bersubsidi, lanjutnya, hanya disalurkan kepada petani yang berhak sesuai kriteria dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. Sementara bagi petani yang tidak sesuai kriteria maka tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Adapun syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi adalah wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), dan menggarap lahan maksimal dua hektar. Pupuk bersubsidi difokuskan pada 9 jenis komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Sebelumnya, ada 72 komoditas yang menjadi fokus pupuk bersubsidi. Sementara itu, stok pupuk bersubsidi secara nasional per 9 Maret 2023, tercatat sebesar 912 ribu ton. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum sebesar 340 ribu ton. Gusrizal mengatakan Pupuk Indonesia memiliki layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WA 0811 9918 001. Melalui layanan pelanggan, Pupuk Indonesia akan menampung keluhan terkait pupuk bersubsidi baik dari ketersediaan, harga, maupun kualitas. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan sering mendapat keluhan petani di desa tentang pupuk bersubsidi. Jokowi juga menyebutkan saat ini seluruh negara di dunia sedang kesulitan mendapatkan bahan baku pupuk

karena perang Rusia-Ukraina. Terganggunya rantai pasok bahan baku pun membuat harga pupuk naik. Untuk itu, pemerintah pun berencana untuk menambah kapasitas produksi pupuk dalam negeri. Pada bulan lalu, Presiden baru saja meresmikan pabrik pupuk NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 500 ribu ton. PIM juga kembali mengoperasikan kembali pabrik PIM 1 dan 2 dengan kapasitas masing-masing 570 ribu ton urea. Selain itu, pemerintah juga berencana akan mendirikan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Proyek tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).